

Kontribusi dan efektivitas sektor kelautan dan perikanan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022-2025

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 4 Nomor 2 2026
Hal. 65-75
DOI: 10.58784/rapi.479

Sammy Victor Gabriel Tumbage

Corresponding author:
tumbagevictor@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jantje J. Tinangon

Sam Ratulangi University
Indonesia

Fanda D. P. Rundengan

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 8 July 2026
Revised 21 July 2026
Accepted 22 July 2026
Published 23 July 2026

ABSTRACT

North Sulawesi Province possesses substantial marine and fisheries potential, as roughly 73 percent of its territory consists of water. However, this potential has not been matched by a proportional contribution to Regional Original Income (Pendapatan Asli Daerah/PAD). This study analyzes the contribution and effectiveness of the marine and fisheries sector to North Sulawesi Province's PAD for the 2022–2025 period, using a descriptive qualitative case-study approach that combines documentary data with interviews with officials from the Marine and Fisheries Agency. The findings show that the sector's contribution to PAD declined over the period, from 0.12% in 2022 to a low of 0.001% in 2024 before recovering slightly to 0.05% in 2025; in every year the contribution falls into the very-low category, indicating that the sector has not meaningfully supported PAD growth. The effectiveness of revenue management fluctuated more sharply, from very effective (125.86%) in 2022 to not effective (0.85%) in 2024, before improving to fairly effective (88.67%) in 2025, with an average effectiveness of 72.88% across the period, classified as less effective overall. These patterns indicate that revenue targets have not been consistently or optimally achieved, and that target-setting for this sector requires a more conservative, evidence-based approach that better anticipates weather-related and external-demand shocks.

Keywords: contribution; effectiveness; marine and fisheries sector; regional original revenue

JEL Classification: H71; H77

©2026 Sammy Victor Gabriel Tumbage, Jantje J. Tinangon, Fanda D. P. Rundengan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menangani dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri, berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta daya saing wilayah tersebut (Yusnety, 2025). Dengan demikian, pembangunan daerah sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menciptakan kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena hal tersebut akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2021). Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mencari dan memanfaatkan sumber pendapatan mereka, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi indikator kemandirian fiskal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Mahmudi, 2020). PAD merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kemandirian suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam mengelola PAD, efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber dana daerah yang mencerminkan kemandirian daerah (Moridu, 2021). Jika pendapatan asli daerah meningkat, itu menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu melakukan desentralisasi fiskal dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah dan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah. Provinsi Sulawesi Utara terletak di lokasi geografis yang strategis dengan karakter sebagai daerah kepulauan. Sekitar 73 persen dari wilayah Sulawesi Utara adalah laut dan memiliki garis pantai hingga ribuan kilometer, sehingga sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor unggulan dengan potensi besar untuk ekonomi daerah (Patiran, 2024). Dengan kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah, sektor ini tidak hanya memberikan kehidupan bagi masyarakat di pesisir, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap PAD (Bahalau, 2025). Pendapatan Asli Daerah dari sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Utara terdiri dari Retribusi Terkait Kelautan dan Perikanan, Sewa Lahan dan Tambat Labuh. ada perbedaan besar antara potensi yang ada dan realisasi manfaat ekonomi untuk daerah. Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan tren yang sama. Penelitian oleh Ersita dan Elim pada tahun 2016 tentang efektivitas penerimaan daerah di Sulawesi Utara untuk tahun 2011-2015 menemukan bahwa tingkat efektivitas pengumpulan retribusi daerah tergolong "cukup efektif." (Ersita, 2016).

Dampak awal situasi pra-pandemi dan memasuki pandemi COVID-19 menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap penetapan target dan strategi pengumpulan retribusi dari sektor kelautan dan perikanan agar dapat mencapai efektivitas yang optimal dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Periode 2022-2025 diperkirakan akan menjadi masa yang dinamis bagi perekonomian daerah. Pandemi COVID-19 terjadi pada tahun 2020-2021, memberikan dampak besar terhadap kegiatan ekonomi, termasuk sektor kelautan dan perikanan. Analisis pada periode ini dapat memberikan wawasan mengenai ketahanan sektor kelautan dan

perikanan dalam menghadapi krisis dan peranannya terhadap stabilitas penerimaan wilayah itu. Maka perlu dilakukan kajian untuk menilai seberapa baik sektor ini dalam memberikan kontribusi nyata pada pendapatan asli daerah. Penting untuk melakukan analisis mendalam tentang sumbangan dan efektivitas sektor kelautan dan perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kita bisa memahami sejauh mana potensi sektor ini telah dimanfaatkan, serta mengetahui peluang dan tantangan yang ada dalam pengelolaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran sektor ini dalam mendanai pembangunan daerah, serta bagaimana cara meningkatkan efektivitas pengelolaannya untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.

2. Tinjauan pustaka Akuntansi pemerintah

Akuntansi pemerintah dapat diartikan sebagai aktivitas penyediaan layanan untuk menyusun informasi keuangan pemerintah berdasarkan pencatatan, pengelompokan, ringkasan transaksi keuangan, serta analisis informasi keuangan. Akuntansi pemerintah adalah bagian dari akuntansi yang mencakup semua aktivitas akuntansi di dalam lingkungan pemerintahan, termasuk Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Salah satu area yang dilakukan adalah pencatatan pengeluaran anggaran dari setiap unit pemerintah. Akuntansi pemerintah didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi dan politik oleh pihak internal dan eksternal pemerintah (Halim, 2021). Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintah mencakup seluruh proses akuntansi yang dilakukan oleh setiap unit kerja pemerintahan menjadi informasi

untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan ekonomi. Akuntansi pemerintah berfungsi untuk memberikan informasi terkait transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah yang tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, dengan tujuan umum akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan (Youdhi Prayogo, 2023).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan sumber lain yang sah. Sumber utama PAD termasuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah total dari berbagai pos penerimaan pajak, pos retribusi, penerimaan non pajak dari perusahaan milik daerah, serta dari investasi dan pengelolaan sumber daya alam. Menurut (Halim, 2021), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pemasukan yang didapat dari sumber-sumber ekonomi yang berasal langsung dari daerah tersebut. Ini menunjukkan seberapa mampu daerah tersebut mendanai pengeluaran pemerintah tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. PAD mencakup penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di dalam wilayah, yang dihimpun sesuai dengan peraturan daerah (Maulan Irwadi, 2024). Jenis-jenisnya meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan PAD lain yang sah. Untuk memaksimalkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, jika pendapatan asli daerah dieksploitasi secara berlebihan, hal ini bisa menjadi beban tambahan bagi masyarakat dan dapat merusak perekonomian (Achmad, 2024).

Kontribusi

Secara umum, sumbangan dapat diartikan sebagai peran atau bantuan yang diberikan oleh seseorang atau kelompok (individu, sektor, lembaga, atau program) untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ekonomi suatu daerah, sumbangan menunjukkan seberapa besar partisipasi suatu sektor dalam berkontribusi pada total pendapatan atau kemajuan ekonomi daerah. Sumbangan diukur sebagai proporsi jenis pendapatan tertentu dibandingkan dengan total pendapatan, yang biasanya dinyatakan dalam persentase (Palilu, 2025). Menurut (Mahmudi, 2020), dalam konteks Pendapatan Asli Daerah, analisis sumbangan digunakan untuk memahami sejauh mana setiap elemen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya memberikan kontribusi terhadap total PAD. untuk menganalisis seberapa besar kontribusi pajak daerah atau retribusi terhadap PAD adalah :

$$\text{Kontribusi} : \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1. Klasifikasi rasio kontribusi

Presentase	Kriteria
0 – 10 %	Sangat Kurang
10 % - 20 %	Kurang
20 % - 30 %	Cukup Baik
40 % - 50 %	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri 690.900-327 tahun 1996

Rasio sumbangan berfungsi untuk menilai seberapa besar jenis pendapatan daerah berkontribusi terhadap total PAD.

Efektivitas

Efektivitas adalah salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu program, kegiatan, atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Ariyani, 2024). Dalam

manajemen publik dan kebijakan daerah, efektivitas berarti seberapa baik hasil yang dicapai sesuai dengan target yang diinginkan. Menurut (Mahmudi, 2020), efektivitas menunjukkan seberapa jauh hasil yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai; semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks khusus keuangan daerah, efektivitas dipahami sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah atau mengelola pengeluaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Cara untuk mengetahui tingkat efektivitas sektor kelautan dan perikanan terhadap PAD adalah :

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Klasifikasi rasio efektivitas

Presentase	Kriteria
> 100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri 690.900-327 Tahun 1996

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dalam anggaran.

3. Metode riset

Jenis penelitian ini Adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna, proses, dan konteks dari fenomena sosial atau ekonomi (Sugiyono, 2022). Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan kebijakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, menjelaskan mengapa sumbangan sektor ini mungkin mengalami perubahan pada tahun 2022-2025, serta menilai efektivitas kebijakan pengelolaannya.

Data adalah kumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Terdapat dua jenis data:

1. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, gambar, dan diagram. Data kualitatif berasal dari observasi lapangan dan menggunakan teori yang ada sebagai pendukung, menghasilkan teori baru dari data tersebut (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh dari wawancara dengan pimpinan atau pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai pedoman wawancara yang telah ditetapkan.
2. Informasi kuantitatif merupakan data yang berupa angka atau yang dapat dihitung. Dalam penelitian ini, data kuantitatif mencakup laporan tentang sasaran dan hasil PAD Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2022 hingga 2025 serta data tentang sasaran dan hasil penerimaan dari sektor kelautan dan perikanan pada periode yang sama.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara yang terpercaya untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dimaksud berupa data:

1. Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara Tahun 2022 – 2025
2. Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara Tahun 2022 – 2025

3. Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 – 2025

4. Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 – 2025

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, angka target dan realisasi yang diperoleh melalui dokumentasi ditabulasikan per tahun. Kedua, rasio kontribusi dan rasio efektivitas dihitung untuk setiap tahun (2022–2025) menggunakan rumus yang disajikan, dan hasilnya diklasifikasikan menggunakan kriteria pada Tabel 1 dan Tabel 2. Ketiga, pola kuantitatif yang dihasilkan diinterpretasikan secara deskriptif dan, jika relevan, dikaitkan dengan penjelasan kontekstual yang diperoleh dari wawancara dengan pejabat dinas serta temuan penelitian terdahulu, khususnya Ersita dan Elim (2016).

Validitas data sekunder dijaga dengan melakukan pengecekan silang antara angka target dan realisasi yang dilaporkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan angka yang digunakan dalam penghitungan rasio kontribusi dan efektivitas, serta dengan memastikan bahwa satu set angka yang konsisten digunakan secara menyeluruh pada bagian Hasil. Kredibilitas informasi wawancara pendukung diperkuat dengan triangulasi terhadap data kuantitatif yang terdokumentasi.

4. Hasil dan pembahasan

Tabel 3. Realisasi penerimaan sektor kelautan dan perikanan

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Keterangan
1	2022	1.339.730.200,00	1.686.241.600,00	Naik
2	2023	1.500.000.000,00	1.142.275.000,00	Turun
3	2024	1.100.000.000,00	8.530.000,00	Turun
4	2025	775.000.000,00	686.598.200,00	Naik

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.

Dapat dilihat pada tabel 3 bahwa penerimaan di sektor kelautan dan

perikanan antara tahun 2022 sampai 2025 menunjukkan perubahan yang cukup

besar. Di tahun 2022, target penerimaan ditetapkan sebesar Rp1.339.730.200,00 tetapi penerimaan riil mencapai Rp1.686.241.600,00. Ini menunjukkan bahwa penerimaan melebihi target, sehingga kinerja tahun itu tergolong sangat baik dengan peningkatan. Namun, di tahun 2023, penerimaan mengalami penurunan. Dari target Rp1.500.000.000,00 hanya berhasil mencapai Rp1.142.275.000,00. Hasil ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, dan menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2024. Target pada saat itu

adalah Rp1.100.000.000,00, tetapi penerimaan sebenarnya hanya sebesar Rp8.530.000,00. Selisih yang sangat besar antara target dan penerimaan ini menunjukkan terjadinya penurunan yang besar di sektor ini. Pada tahun 2025, target kembali diturunkan menjadi Rp775.000.000,00, sementara realisasi mencapai Rp686.598.200,00. Meskipun penerimaan mendekati target, angka tersebut tetap lebih rendah dari yang dicapai pada tahun 2022 dan 2023, serta belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan tahun 2022-2025

$$1. \text{ Kontribusi Tahun 2022} = \frac{1.686.241.600}{1.464.716.968.805} \times 100\% = 0,12\%$$

Dari perhitungan diatas dapat diperoleh penerimaan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 sebesar 0,12%

$$2. \text{ Kontribusi Tahun 2023} = \frac{1.142.275.000}{1.460.744.817.777} \times 100\% = 0,08\%$$

Dari perhitungan diatas dapat diperoleh penerimaan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 sebesar 0,08%

$$3 \text{ Kontribusi Tahun 2024} = \frac{8.530.000}{1.521.049.403.394} \times 100\% = 0,001\%$$

Dari perhitungan diatas dapat diperoleh penerimaan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024 sebesar 0,001%

$$4 \text{ Kontribusi Tahun 2025} = \frac{687.000.500}{1.377.943.945.482} \times 100\% = 0,05\%$$

Dari perhitungan diatas dapat diperoleh penerimaan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2025 sebesar 0,05%

Tabel 4. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan tahun 2022-2025

No.	Tahun	Realisasi DKP (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
1	2022	1.686.241.600,00	1.464.716.968.805	0,12%	Sangat Kurang
2	2023	1.142.275.000,00	1.460.744.817.777	0,08%	Sangat Kurang
3	2024	8.530.000,00	1.521.049.403.394	0,001%	Sangat Kurang
4	2025	687.000.500,00	1.377.943.945.482	0.05%	Sangat Kurang

Sumber: Data olahan, 2026

Berdasarkan analisis kontribusi aktual sektor kelautan dan perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2022 hingga 2025, terlihat bahwa kontribusi sektor ini masih sangat kecil per tahunnya. Di tahun 2022, kontribusi dari sektor kelautan dan perikanan mencapai 0,12%. Meskipun angka nominalnya tergolong besar, kontribusinya terhadap total PAD tetap rendah karena PAD di provinsi ini memiliki jumlah yang sangat tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya, tahun 2022 mencatat angka kontribusi tertinggi. Pada tahun 2023, kontribusi sektor kelautan dan perikanan turun menjadi 0,08%. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya hasil dari sektor ini dibandingkan tahun sebelumnya, sementara PAD tetap stabil. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor kelautan

dan perikanan dalam memberikan sumbangan kepada PAD menurun, sehingga dinyatakan sangat kurang. Kemudian, di tahun 2024, kontribusi sektor ini mengalami penurunan sangat drastis hingga mencapai hanya 0,001%. Penurunan ini terjadi karena hasil dari sektor kelautan dan perikanan sangat kecil dibandingkan total PAD. Dengan kontribusi yang hampir tidak berdampak, maka tahun ini kinerja sektor ini dalam mendukung PAD dinyatakan sangat kurang. Di tahun 2025, kontribusi sektor kelautan dan perikanan meningkat lagi menjadi 0,05%. Meskipun masih tergolong rendah, kenaikan ini menunjukkan ada perbaikan kinerja dibandingkan tahun 2024. Namun, kontribusi sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2025 tetap dinyatakan sangat kurang, meskipun perlu usaha lebih agar kontribusinya terhadap PAD bisa ditingkatkan.

Efektivitas sektor kelautan dan perikanan tahun 2022-2025

1. Tahun 2022

Berdasarkan Data yang di peroleh, target penerimaan realisasi sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp.1.339.730.200,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.686.241.600,00, maka efektivitas penerimaan sektor kelautan dan perikanan dapat di ketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.686.241.600}{1.339.730.200} \times 100\% = 125,86\%$$

Jadi tingkat efektivitas sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2022 sebesar 125,86%

2. Tahun 2023

Berdasarkan Data yang di peroleh, target penerimaan realisasi sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp.1.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.142.275.000,00, maka efektivitas penerimaan sektor kelautan dan perikanan dapat di ketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.142.275.000}{1.500.000.000} \times 100\% = 76,15\%$$

Jadi tingkat efektivitas sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2023 sebesar 76,15%

3. Tahun 2024

Berdasarkan Data yang di peroleh, target penerimaan realisasi sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.530.000,00, maka efektivitas penerimaan sektor kelautan dan perikanan dapat di ketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{8.530.000}{1.000.000.000} \times 100\% = 0,85\%$$

Jadi tingkat efektivitas sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2024 sebesar 0,85%

4. Tahun 2025

Berdasarkan Data yang di peroleh, target penerimaan realisasi sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp.774.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.687.000.500,00, maka efektivitas penerimaan sektor kelautan dan perikanan dapat di ketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{687.000.500}{774.750.000} \times 100\% = 88,67\%$$

Jadi tingkat efektivitas sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2025 sebesar 88,67%

Tabel 5. Efektivitas sektor kelautan dan perikanan

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
1	2022	1.339.730.200,00	1.686.241.600,00	125,86%	Sangat Efektif
2	2023	1.500.000.000,00	1.142.275.000	76,15%	Kurang Efektif
3	2024	1.000.000.000,00	8.530.000,00	0,85%	Tidak Efektif
4	2025	774.750.000,00	687.000.500,00	88,67%	Cukup Efektif

Sumber: Data olahan, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2022 tingkat efektivitas pengelolaan sektor kelautan dan perikanan tercatat di 125,86% (sangat efektif) dengan realisasi Rp. 1.686.241.600,00 dari target yang direncanakan sebesar Rp. 1.339.730.200,00. Pada tahun 2023, efektivitas turun menjadi 76,15% (kurang efektif) dengan realisasi sebesar Rp.1.142.275.000,00 dari target Rp.1.500.000.000,00. Di tahun 2024, efektivitas turun drastis menjadi 0,85% (tidak efektif) dengan realisasi Rp.8.530.000,00 dari target

Rp.1.000.000.000,00. Sementara itu, pada tahun 2025 tingkat efektivitas meningkat lagi menjadi 88,67% (cukup efektif) dengan realisasi Rp.687.000.500,00 dari target Rp.774.750.000,00.

Dari analisis efektivitas tersebut, terlihat bahwa pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Utara dari tahun 2022 hingga 2025 mengalami penurunan. Pada tahun 2022, efektivitas ada di angka 125,86% (sangat efektif), namun pada tahun 2023 menurun menjadi 76,15% (kurang efektif) disebabkan oleh naiknya biaya operasional seperti bahan bakar dan

logistik. Di tahun 2024, efektivitas hampir menyentuh 100% lebih rendah dari tahun sebelumnya akibat beberapa faktor seperti perubahan dalam kebijakan fiskal, pengaturan anggaran daerah, cuaca ekstrem, ketidakstabilan ekonomi global, serta menurunnya permintaan ekspor produk perikanan yang mempengaruhi kinerja sektor ini.

Namun, pada tahun 2025, efektivitas kembali naik menjadi 88,67%. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penerimaan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Utara antara tahun 2022 hingga 2025 dinilai "kurang efektif", dengan nilai rata-rata target berada di Rp.1.153.620.050,00. Dan rata-rata yang berhasil dikumpulkan adalah Rp.881.011.775,00, sehingga persentase penerimaan sektor ini berada di angka 72,88%, yang menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Utara dinilai kurang efektif.

Wawancara dengan pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan mengungkapkan beberapa kemungkinan faktor yang berkontribusi terhadap fluktuasi tersebut, terutama penurunan tajam yang terjadi pada tahun 2024. Kenaikan biaya operasional termasuk bahan bakar dan logistik disebut sebagai salah satu faktor penyebab penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Untuk penurunan yang jauh lebih besar pada tahun 2024, pejabat dinas menunjuk pada kombinasi perubahan kebijakan fiskal daerah dan perencanaan anggaran, kondisi cuaca ekstrem yang memengaruhi aktivitas penangkapan ikan, ketidakstabilan ekonomi global, serta menurunnya permintaan ekspor produk perikanan. Perlu dicatat bahwa penjelasan-penjelasan ini diperoleh melalui wawancara dan belum diverifikasi secara independen terhadap sumber-sumber terdokumentasi, sehingga disajikan di sini sebagai penjelasan kontekstual dari praktisi, bukan sebagai penyebab yang telah terbukti secara statistik; verifikasi terhadap catatan Badan Pendapatan

Daerah (Bapenda), data meteorologi (BMKG), atau statistik ekspor nasional (BPS) diidentifikasi sebagai prioritas untuk penelitian selanjutnya pada Bagian 5.2.

Dibandingkan dengan temuan Ersita dan Elim (2016) sebelumnya, yang melaporkan bahwa pemungutan retribusi daerah di Sulawesi Utara periode 2011–2015 rata-rata “cukup efektif”, penelitian ini menemukan kinerja efektivitas yang jauh lebih fluktuatif dan, pada tahun 2024, jauh lebih buruk khususnya pada sektor kelautan dan perikanan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor struktural atau administratif apa pun yang mendukung efektivitas yang relatif stabil satu dekade lalu mungkin tidak berlaku secara merata di seluruh sektor penerimaan, dan bahwa sektor kelautan dan perikanan secara khusus mungkin memerlukan perhatian tersendiri dalam penetapan target ke depan misalnya, melalui perumusan target yang lebih konservatif dan berbasis bukti yang lebih mengantisipasi guncangan terkait cuaca dan permintaan eksternal, dibandingkan penyesuaian target tahun-ke-tahun yang tampak statis sebagaimana terlihat pada Tabel 3 dan Tabel 5.

5. Kesimpulan

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara periode 2022–2025 secara umum mengalami penurunan, dari titik tertinggi sebesar 0,12% pada tahun 2022 menjadi hanya 0,001% pada tahun 2024, sebelum sedikit membaik menjadi 0,05% pada tahun 2025, dan pada seluruh tahun pengamatan tetap berada pada kategori sangat kurang. Efektivitas pengelolaan penerimaannya juga berfluktuasi tajam, dari kategori sangat efektif (125,86%) pada tahun 2022 menurun menjadi tidak efektif (0,85%) pada tahun 2024, kemudian membaik menjadi cukup efektif (88,67%) pada tahun 2025, dengan rata-rata efektivitas 72,88% yang tergolong kurang efektif. Pola ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan yang tinggi

tidak serta-merta menghasilkan kontribusi fiskal yang berarti apabila basis penerimaan sektor secara struktural jauh lebih kecil dibanding total PAD, dan bahwa fluktuasi kinerja lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal—seperti perubahan kebijakan fiskal daerah, cuaca ekstrem, ketidakstabilan ekonomi global, dan menurunnya permintaan ekspor produk perikanan—dibandingkan oleh peningkatan aktivitas ekonomi semata.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa rasio kontribusi dan rasio efektivitas perlu dibaca secara simultan, bukan terpisah, serta menunjukkan bahwa kestabilan kinerja penerimaan daerah bersifat kontekstual dan rentan terhadap guncangan eksternal dibandingkan temuan Ersita dan Elim (2016) pada periode sebelumnya. Secara praktis, Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Bapenda Provinsi Sulawesi Utara perlu menetapkan target penerimaan yang lebih konservatif dan berbasis bukti historis, mendiversifikasi sumber retribusi, serta memperkuat sarana-prasarana, pengolahan hasil, digitalisasi pemasaran, dan regulasi retribusi agar kontribusi fiskal sektor ini lebih proporsional terhadap potensinya. Penelitian ini masih terbatas pada rentang empat tahun anggaran dan penjelasan kontekstual dari wawancara yang belum diverifikasi secara independen, sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperpanjang periode pengamatan, memverifikasi data dengan catatan Bapenda, BMKG, dan BPS, serta membandingkan pola kontribusi dan efektivitas sektor ini antarwilayah di Indonesia.

Daftar pustaka

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press.
- Achmad, K. (2024). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batam tahun anggaran 2021–2023. *Jurnal Bening*, 11(2), 383–391. <https://doi.org/10.33373/bening.v11i2.6839>
- Ariyani, N., Arlan, A. S., & Handayani, R. (2024). Efektivitas penggunaan aplikasi e-kinerja pegawai pada Kantor Camat Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal MSDM: Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(3), 622–633. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JMSDM/article/view/827>
- Bahalau, Y. P. M., Derek, Z. E., & Therok, F. A. (2025). Pengembangan konsep blue economy untuk meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Utara. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 17(3), 461–473. <https://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana/article/view/949>
- Ersita, M., & Elim, I. (2016). Analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 889–897. <https://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11818>
- Halim, A. (2021). *Manajemen keuangan daerah otonom*. UPP STIM YKPN.
- Irwadi, M., Irsan, Winarni, S., & Vanessa. (2024). Analisis pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. *Sustainability: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2(2), 69–88. <https://jurnal.unisti.ac.id/sustainability/article/view/279>
- Mahmudi. (2020). *Manajemen keuangan daerah*. STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi & keuangan manajemen daerah*. Penerbit ANDI.
- Moridu, I. (2021). Efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal Sinar*

- Manajemen* 8(2), 90–97.
<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JSM/article/view/1643>
- Palilu, A., Lopulalan, J. E., Matahelumual, F., Ferdinandus, W., & Lumule, V. L. (2025). Analisis kontribusi sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan dampaknya bagi pendapatan per kapita masyarakat Kota Sorong. *Jurnal Jendela Ilmu*, 6(2), 33–39.
<https://jurnal.lpmiunvic.ac.id/index.php/ji/article/view/225>
- Patiran, R. G. (2024). Peranan sektor kelautan dan perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Fakfak. *Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(5), 226–235.
<https://doi.org/10.61132/menawan.v2i5.824>
- Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). Analisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 3(2), 44–58.
<https://doi.org/10.51903/dinamika.v3i2.380>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Yusnety, Y. (2025). Analisis penerapan otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(2), 17–23.
<https://doi.org/10.58707/aldalil.v3i2.774>